

BAB II

Beragama Minus Kesalehan

Memoderasi Pemikiran Islam

Diakui atau tidak, wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini telah diwarnai dialektika pemikiran yang melibatkan kelompok liberal dan fundamental. Jika dilihat mundur, pergumulan kelompok Islam liberal dan Islam fundamental bahkan telah terjadi sejak 1970-an.

Saat itu Nurcholish Madjid (Cak Nur), tokoh sentral pembaruan pemikiran Islam, terlibat perdebatan sengit dengan kelompok Islam fundamental. Beberapa gagasan Cak Nur pun menjadi perdebatan hangat seperti sekularisasi, Islam yes partai Islam no, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), ide tentang kemajuan (*the idea of progress*), dan pentingnya sikap terbuka (*inklusivisme*).

Meski tidak menggunakan istilah Islam liberal dalam karyanya, melihat substansi pemikiran yang dikembangkan, tampaknya Cak Nur layak dijadikan rujukan kelompok Islam liberal. Menurut Charles Kurzman dalam *Liberal Islam: A Sourcebook* (1998), umumnya tema yang diwacanakan kelompok Islam liberal meliputi menolak teokrasi, demokrasi, relasi agama dan negara, pluralisme, hak-hak perempuan, dan kebebasan berpikir.

Sementara kelompok Islam fundamental melalui beberapa tokoh dan jaringan institusinya juga tidak mau kalah. Mereka terus mengampanyekan penolakan terhadap gagasan kelompok Islam liberal. Meski bernaung dalam organisasi yang berbeda-beda, menurut Dekmejian dalam *Islamic Revival* (1988), kelompok ini umumnya mewacanakan pemikiran tentang; Islam sebagai totalitas ajaran yang meliputi agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*), anjuran kembali kepada Alquran dan Sunnah, puritanisme dan keadilan sosial (*puritanism and social justic*), kedaulatan hanya ada pada Allah dan kekuasaan tunduk pada syariah (*Allah's sovereignty and the rule syari'ah*), serta jihad sebagai sarana perjuangan untuk mencapai tujuan.

Kelompok Islam fundamental juga terus berusaha untuk menanamkan pengaruh baik melalui perjuangan politik maupun kultural. Dengan didorong keinginan untuk keluar dari apa yang mereka sebut sebagai krisis multidimensi di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, spiritual, dan militer, kelompok ini terus berusaha bangkit. Seiring dengan meningkatnya peran kelompok Islam fundamental tampak sekali bahwa kelompok Islam liberal kurang dapat memberikan pengaruh.

Kelompok Islam liberal bahkan tampak lebih sering menjadi korban ketimbang pemenang. Selanjutnya Dekmejian menjelaskan karakter kelompok Islam fundamental meliputi: merata (*pervasiveness*), memiliki banyak pusat (*polycentrism*), dan berjuang secara terus-menerus (*persistence*). Seperti dapat kita amati, gerakan Islam fundamental yang menonjolkan simbol-simbol keagamaan merupakan fenomena yang merata hampir seluruh kota besar di Tanah Air.

Gerakan ini bahkan dapat dikatakan bersifat transnasional, menembus batas wilayah negara. Sementara karakter *polycentrism* berarti bahwa dalam rangka memperjuangkan ideologinya, kelompok Islam fundamental telah menggunakan banyak organisasi. Setiap organisasi bertumpu pada seorang pemimpin kharismatik. Menariknya, meski yang diperjuangkan relatif sama, di antara mereka ternyata tidak saling berhubungan secara organisatoris.

Berkaitan dengan karakter *polycentrism* ini peranan pemimpin lokal menjadi sangat menonjol dalam melakukan rekrutmen dan indoktrinasi terhadap anggota baru. Sementara karakter *persistence* tampak dalam perjuangan kelompok Islam fundamental yang tidak

pernah mengenal lelah. Bahkan terkadang perjuangan itu dilakukan dengan cara-cara radikal seperti yang ditempuh anggota jaringan gerakan terorisme.

Karena itu, dapat dipahami mengapa terorisme di Tanah Air terasa sulit dilumpuhkan meski banyak tokohnya yang telah dihukum dan bahkan ditembak mati. Harus diakui, memang tidak semua kelompok Islam fundamental menempuh perjuangan dengan kekerasan. Tetapi, protes dengan melibatkan massa dalam jumlah yang besar secara terus-menerus setidaknya telah menunjukkan betapa kelompok tersebut bersifat sangat reaksioner dalam merespons situasi yang berkembang.

Jika melihat tren yang berkembang akhir-akhir ini, besar kemungkinan kelompok Islam fundamental akan tetap memberikan pengaruh yang signifikan. Apalagi jika melihat kecenderungan Islam fundamental yang kini sedang mengalami peningkatan syahwat politik. Karena itu, penting direnungkan hipotesis William Liddle, Indonesianis asal Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa semakin demokratis sebuah negara, semakin besar kemungkinan munculnya gerakan fundamental.

Sebaliknya, semakin otoriter suatu negara, semakin kecil pula kemungkinan munculnya gerakan fundamentalis. Agar dialektika pemikiran Islam tidak saling berhadapan, rasanya setiap kelompok perlu bergerak menuju ke tengah sehingga lebih moderat. Langkah ini penting karena setiap kelompok memiliki kelemahan mendasar. Kelompok Islam liberal, meminjam istilah Kuntowijoyo (2001), tampak mengalami gejala "sawan kekanakkanan".

Fenomena kekanak-kanakan ditunjukkan melalui cara berpikir yang "sok liberal" atau "kekiri-kirian (sok radikal)." Wacana yang dikemukakan juga bukan sesuatu yang baru, bahkan terkadang kurang mendalam, parsial, dan terputus dari khazanah masa lampau. Sementara Islam fundamental yang kerap menampilkan wajah pemikiran radikal jelas kurang relevan jika dihadapkan pada persoalan-persoalan sosial keagamaan era kontemporer.

Sebagai upaya untuk memoderasi pemikiran Islam, yang pertama harus dilakukan adalah menganggap pemikiran itu sebagai khazanah sehingga tidak perlu disakralkan. Langkah ini penting agar tidak terjadi penyakralan terhadap pemikiran keagamaan (*taqdis al-afkar al-diniy*). Dengan menempatkan produk pemikiran sebagai khazanah berarti akan menghilangkan sebagian "beban" sejarah sehingga kita

dapat lebih kritis memberikan koreksi.

Langkah kedua adalah menampilkan corak pemikiran Islam yang menggabungkan aspek modernitas dan tradisionalitas, yang dalam bahasa pesantren dikatakan; *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*, menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Sikap ini penting agar pembaruan pemikiran memiliki kesinambungan sejarah dan tidak tercerabut dari akar tradisinya.

Langkah ketiga adalah dengan memperbanyak dialog pemikiran. Dialog pemikiran yang tulus dengan disertai kesediaan untuk menerima kritik mutlak dilakukan supaya tidak ada prasangka antarkelompok. Agar tidak terkesan formal, dialog juga dapat diwujudkan melalui kegiatan yang bersifat informal seperti pentas budaya, seni, musik, dan olahraga. Melalui dialog pemikiran dan pertemuan-pertemuan informal inilah, kita dapat keluar dari dua ekstremitas pemikiran; liberal dan fundamental.

Berdamai dengan Perbedaan

Ungkapan penuh kegembiraan sudah seharusnya kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Itu karena kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Umat Islam pun menyambut Ramadan dengan ungkapan; *marhaban ya Ramadan*. Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap pribadi harus menyiapkan diri dengan hati yang lapang untuk ditaburi benih-benih kebaikan dari Ramadan. Bagi setiap muslim, Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk mengasah dan mengasuh jiwa sehingga bersih dan suci dari segala kekhilafan.

Meski seringkali ada perbedaan dalam menentukan awal Ramadan, umat tetap menyambut bulan penuh berkah dengan suka cita. Seperti diketahui, Muhammadiyah jauh hari telah menetapkan awal Ramadan 1435 Hijriah satu hari lebih dulu dari pemerintah dan NU. Bahkan beberapa kelompok keagamaan seperti tarekat Naqsyabandiyah, jamaah al-Nadhir, dan Aliran Rabo Wage (Aboge), juga menentukan awal dan akhir Ramadan berbeda dari pemerintah. Semua perbedaan itu ternyata tidak mengurangi

sambutan umat terhadap datangnya tamu agung Ramadan.

Setiap ormas dan faham keagamaan pasti memiliki hitung-hitungan tatkala menentukan awal dan akhir Ramadan. Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat pluralitas pandangan umat dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Karena pluralitas pandangan merupakan suatu keniscayaan, maka harus disiapkan sikap untuk berdamai dengan perbedaan. Umat harus diingatkan bahwa sejarah agama-agama juga lahir dalam suasana budaya masyarakat yang plural.

Karena itu tidak mengherankan jika dalam kitab suci ditegaskan bahwa pluralitas merupakan rencana Tuhan (*sunnatullah*). Dalam situasi budaya masyarakat yang plural itulah setiap pribadi harus bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Sikap ini penting karena tidak mungkin memaksa orang lain untuk mengikuti pandangan kita. Jika perbedaan dipahami secara positif maka itu justru menjadi ujian bagi setiap pribadi. Pada saat itulah kita akan menyaksikan siapa yang paling banyak memberikan kontribusi bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam Alqur'an ditekankan bahwa setiap penganut agama dan paham keagamaan harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik (QS. Al-Maidah: 48). Kalam Ilahi ini penting dijadikan kerangka etik untuk mengimplementasikan ajaran tentang persaudaraan (*ukhuwah*). Karena itu perbincangan mengenai ukhuwah harus terus digelorakan seiring terjadinya beragam konflik sosial berlatar belakang perbedaan agama dan paham keagamaan.

Mengingat pentingnya ajaran tentang ukhuwah maka kita harus mempersaudarakan berbagai paham keagamaan. Sejarah Islam yang dihentikan oleh peperangan bersaudara dan sikap saling mengkafirkan, terutama oleh kaum Khawarij, harus dijadikan pelajaran berharga. Dengan pikiran yang jernih kita harus merumuskan sikap agar berdamai dengan perbedaan. Termasuk perbedaan dalam menentukan awal dan akhir Ramadan.

Dalam sebuah pernyataan yang penuh hikmah dikatakan bahwa perbedaan di kalangan umat (yang berilmu) adalah rahmat. Kita juga sering mendengar slogan yang menyatakan bahwa perbedaan itu indah. Karena itu kita harus tetap bersatu dalam keragaman (*unity in diversity*). Meski realitas bangsa kita menunjukkan "ber-Bhinneka", namun harus tetap "Tunggal Ika". Itu berarti perbedaan seharusnya tidak menghalangi kita untuk bersatu sehingga kehidupan

terasa penuh rahmat dan indah.

Selain perbedaan dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, bulan penuh berkah ini juga masih sering diwarnai aksi *sweeping* oleh ormas keagamaan tertentu. Tindakan *sweeping* biasanya dilakukan di sejumlah rumah hiburan umum (RHU) karena dianggap sumber kemaksiatan. Restoran dan warung yang buka pada siang hari juga tidak luput dari *sweeping*. Tindakan *sweeping* ini pun dikemas dalam konteks dakwah amar makruf nahi munkar (mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran).

Tindakan *sweeping*, apalagi disertai kekerasan, yang dikatakan merupakan implementasi ajaran dakwah amar makruf nahi munkar jelas tidak dapat dibenarkan. Itu karena menurut pembaru Islam, Jalaluddin al-Suyuti, yang berhak melaksanakan tugas amar makruf nahi munkar hanyalah ulama dan pemerintah. Menurut al-Suyuti, ulama memiliki otoritas untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar karena memiliki ilmu. Sementara pemerintah memiliki seperangkat kekuasaan untuk memaksa rakyat menaati peraturan dan menindak setiap perbuatan yang melanggar hukum.

Itu berarti jika ada perbuatan yang dianggap menodai kesucian Ramadan, masyarakat harus segera melaporkan pada aparat. Hal ini penting ditekankan untuk menghindari kekerasan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pengelola RHU, restoran, dan warung, juga wajib diingatkan untuk menaati peraturan demi menjaga kekhusyukan umat beribadah selama Ramadan.

Kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan hingga kini masih menyisakan persoalan. Hal itu setidaknya dapat diamati dari berbagai kasus kekerasan sosial bernuansa perbedaan paham keagamaan. Salah satu contohnya adalah kekerasan yang terjadi pada penganut Syi'ah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Akibat konflik tersebut kelompok Syi'ah harus terusir dari kampung halamannya. Kasus ini menjadi indikator ketidaksiapan kelompok-kelompok yang berbeda untuk hidup bersama.

Untuk melaksanakan ajaran agama yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap perbedaan, rasanya menarik disimak kisah pendiri Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, yang pernah tidak membaca qunut saat shalat subuh karena ingin menghormati makam pendiri Mazhab Hanafi, Abu Hanifah, yang berada tidak jauh dari tempatnya shalat. Teladan Imam Syafi'i itu penting

dikemukakan sebagai pelajaran betapa tokoh-tokoh mazhab fikih saling menghormati.

Sering dikatakan bahwa mayoritas umat Islam Indonesia merupakan penganut Mazhab Syafi'i . Karena itu, mestinya kisah inspiratif Imam Syafi'i dijadikan teladan dalam menyikapi perbedaan. Bahkan seharusnya semua tradisi keberagamaan dikembalikan pada Tuhan. Sebab, hanya Tuhan yang berotoritas untuk memutuskan persoalan perbedaan paham keagamaan.

Itu berarti kita tidak boleh mengambil alih otoritas Tuhan dengan cara apa pun, termasuk memberikan fatwa yang tidak menghargai perbedaan di kalangan umat. Termasuk dalam hal ini adalah mereka yang berbeda dalam mengawali dan mengakhiri Ramadan. Justru yang harus dikembangkan adalah menghormati perbedaan. Karena itu mari kita gelorakan semangat untuk merayakan dan menghormati perbedaan (*celebrate and respect diversity*).

Menjauhi Paradoks Ramadan

Sebagai umat Islam, kita terus bersemangat dalam menyambut bulan Ramadan. Meski penentuannya terkadang berbeda, umat selalu mengucapkan salam kepada bulan yang penuh rahmat dan ampunan dengan ungkapan: *marhaban ya Ramadan*. Ungkapan penuh kegembiraan itu menunjukkan bahwa setiap pribadi telah menyiapkan diri dengan hati yang lapang untuk ditaburi benih-benih kebaikan dari Ramadan. Hal itu karena bagi setiap Muslim Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk mengasah dan mengasuh jiwa sehingga bersih dan suci dari segala kekhilafan.

Seiring dengan datangnya Ramadan, umat Islam terutama yang berada di perantauan pasti disibukkan dengan persiapan mudik ke kampung halaman. Tradisi mudik dipastikan semakin meningkat saat menjelang lebaran. Hal itu dapat diamati dari membludaknya pesanan tiket menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Tiket pesawat, kereta api, dan bus antar kota, telah ludes habis terjual. Jelang akhir Ramadan juga memberikan kesibukan pada mereka yang hendak

pulang ke kampung halaman dengan menggunakan kendaraan pribadi. Meski perjalanan terasa berat dengan biaya yang tidak murah, namun semua itu dijalani dengan penuh kegembiraan.

Uniknya tradisi mudik seakan menjadi ritual bagi semua kalangan. Tidak peduli kelas sosial atas, menengah, atau rakyat jelata. Berbagai motivasi pun turut menyertai pemudik, seperti rindu kampung halaman, sungkem orang tua, silaturahmi dengan saudara, *nyekar* anggota keluarga yang telah meninggal dunia, dan keinginan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Karena itulah tidak berlebihan jika Andre Moller dalam *Ramadan di Jawa: Pandangan dari Luar* (2002) mengatakan bahwa fenomena mudik merupakan aktivitas keagamaan yang khas dan unik di Nusantara untuk menyambut Ramadan dan hari raya Idul Fitri.

Perlu ditekankan bahwa yang harus dipersiapkan untuk menyambut Ramadan adalah menata hati. Hal itu penting agar kita mampu memanfaatkannya sebagai momentum untuk memperbanyak ibadah. Di samping untuk memperbanyak ibadah, Ramadan sejatinya dapat digunakan sebagai momentum untuk mengevaluasi kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengotori hati. Banyak pelajaran berharga yang dapat diperoleh selama menjalani puasa Ramadan seperti nilai-nilai kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, solidaritas sosial, serta penghargaan pada pahala dan kenikmatan yang dijanjikan Allah SWT.

Sayang sekali tidak semua orang mampu menuai hasil dari *training* Ramadan. Bahkan ada sebagian umat yang perilakunya bertentangan dengan nilai-nilai Ramadan. Perilaku mereka ini dapat dikategorikan sebagai paradoks Ramadan. Paling tidak ada tiga jenis perilaku yang disadari atau tidak dapat merusak nilai-nilai puasa Ramadan.

Pertama, perilaku boros dan konsumtif. Perilaku boros ini dapat diamati melalui kebiasaan umat yang suka berbelanja secara berlebihan saat Ramadan. Pola hidup boros dan konsumtif semakin meningkat saat jelang lebaran. Karena berperilaku konsumtif maka mereka pun menyambut Ramadan dengan ungkapan; *marhaban ya bulan belanja*. Anekdote ini menunjukkan betapa budaya konsumtif telah menjadi gaya hidup sebagian umat selama Ramadan. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selalu ada persaingan yang cukup sengit antara masjid dan pusat perbelanjaan. Itu terjadi terutama saat pertengahan Ramadan hingga jelang Idul Fitri. Budaya

konsumtif jelas menjadi paradoks Ramadan yang mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan.

Kedua, perilaku tidak sabar. Hal itu dapat diamati dari kegiatan sebagian organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang suka menempuh jalan anarkistis dengan alasan ingin menjaga suasana Ramadan. Dengan mengatasnamakan dakwah untuk memerintah kebaikan dan melarang kemunkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*), mereka tindak segan melakukan *sweeping* dan tindak kekerasan. Padahal prinsip dalam berdakwah semestinya mengajak dan merangkul. Nabi SAW pun berpesan agar dalam berdakwah selalu berpegang pada prinsip mempermudah dan tidak mempersulit, mengembirakan dan tidak menakut-nakuti.

Ramadan jelas mengajarkan nilai-nilai kesabaran seperti tampak dalam ajaran untuk menjaga diri dari tindakan yang dapat membatalkan dan merusak ibadah puasa. Hal itu berarti bahwa setiap orang yang berpuasa tidak boleh melakukan kekerasan pada siapa pun dan atas nama apa pun. Justru sikap berempati pada orang lain yang harus dikedepankan. Pihak-pihak yang berpotensi merusak suasana Ramadan juga harus menunjukkan sikap berempati pada orang yang berpuasa. Pada konteks inilah para pengelola hiburan malam, rumah makan, dan warung tegal (*warteg*), harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ketiga, perilaku bermalas-malasan. Jika sifat bermalas-malasan menjadi budaya selama Ramadan maka produktivitas kerja umat akan menurun drastis. Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi berpuasa dapat menimbulkan daya tahan tubuh menurun. Tetapi itu jelas bukan alasan untuk mengurangi produktivitas. Harus selalu diingat bahwa sifat malas merupakan paradoks Ramadan sehingga harus dijauhi.

Spirit bekerja keras terasa sejalan dengan pernyataan Ilahi bahwa Allah terus berada dalam kesibukan (QS. Al-Rahman: 29). Melalui kerja keras itulah kita menyaksikan banyak karya besar Nabi Muhammad dan sahabatnya pada bulan Ramadan. Sebagai contoh, kemenangan pasukan Muslim dalam Perang Badar dan penaklukan kota Makkah. Sejarah keemasan Islam juga diwarnai prestasi hebat yang diukir pada bulan Ramadan seperti keberhasilan menaklukkan Spanyol dan kemenangan dalam Perang Salib. Bahkan pernyataan kemerdekaan RI juga diproklamasikan pada bulan Ramadan.

Berbagai peristiwa itu menunjukkan bahwa Ramadan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kerja keras dan produktivitas. Bukankah Ramadan secara bahasa berarti membakar? Yang harus dibakar adalah sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai Ramadan. Karena itu, mari jauhi perilaku yang menjadi paradoks Ramadan.

Mudik ke Kampung Rohani

Dalam setiap bulan Ramadan, seluruh umat Islam berlomba-lomba mencari pahala sebesar-besarnya dari Allah SWT. Tidak hanya menjalankan ibadah puasa, banyak umat Islam yang tidak ingin menyalahkan waktu untuk beribadah, baik membaca Alquran, menjalankan shalat sunah, shalat berjamaah, mengikuti ceramah-ceramah dari para mubalig, maupun berbuat kebaikan seperti bersedekah. Kedekatan diri terhadap sang khalik pun semakin terasa begitu mendalam.

Dalam perspektif tasawuf, perasaan dekat dengan Allah itu disebut dengan *muraqabah*. Merasa dekat dengan Allah itulah sesungguhnya esensi nilai-nilai ketakwaan yang menjadi tujuan puasa (QS. Al-Baqarah: 183). Puasa telah mengajarkan makna kehadiran Allah dalam hidup. Dengan kata lain, melalui puasa kita merasakan Allah benar-benar bersifat *omnipresent*. Kesadaran itu membuat orang yang berpuasa mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa.

Tantangan kita selanjutnya adalah menjaga amalan baik yang telah dilakukan selama Ramadan untuk dibudayakan sepanjang tahun. Namun, dalam proses kedekatan diri kepada Allah tersebut, terdapat fenomena yang khas dan unik di seantero Nusantara saat mendekati pengujung Ramadan. Fenomena itu adalah tradisi mudik Lebaran.

Tradisi mudik Lebaran seakan menjadi ritual bagi seluruh kalangan. Baik kalangan ekonomi menengah ke bawah maupun ke atas ikut menikmati tradisi tersebut. Hawa kampung halaman dan berkumpul keluarga terasa sangat kental. Dalam budaya Jawa ada istilah *sangkan paraning dumadi*. *Sangkan paran* berarti asal mula tujuan atau arah dan *dumadi* berarti kejadian atau yang terjadi. Seseorang harus berusaha menggapai kesadaran hidup. "Tujuanmu apa? Untuk apa? Dan ke mana?"

Sedangkan mudik (menuju udik) atau pulang ke kampung halaman/desa, dari hilir (perantauan) kembali ke hulu (kampung halaman), memiliki berbagai motivasi yang menyertai para pemudik. Misalnya, rindu kampung halaman, sungkem orang tua, silaturahmi dengan saudara, nyekar anggota keluarga yang telah meninggal dunia, dan bahkan ada yang ingin berbagi kebahagiaan dengan sesama.

Itu sebabnya rata-rata pemudik rela mengeluarkan banyak biaya, bersusah payah, berdesak-desakan, dan terkadang tidak memedulikan keselamatan diri. Fenomena seperti itu bisa dilihat di terminal, stasiun, pelabuhan, dan bandara. Di sepanjang jalan seorang pemudik mengendarai sepeda motor berboncengan dengan membawa barang-barang yang sangat banyak. Itulah tradisi unik yang tidak pernah lepas dari Nusantara ini.

Bahkan, tradisi mudik tersebut juga berpengaruh pada pergerakan perekonomian di pedesaan. Mayoritas mereka pasti mudik ke desa. Keterkaitan mudik dengan pertumbuhan ekonomi di desa bisa diamati melalui kebiasaan pemudik yang pulang kampung dengan membawa hasil kerja di perantauan berupa uang dan barang dalam jumlah besar. Mereka yang datang dengan berbagai latar belakang sosial biasanya membagikan bingkisan Lebaran kepada keluarga dan tetangga terdekat.

Tradisi berbagi yang dilakukan pemudik itu merupakan implementasi ajaran agama yang menekankan pentingnya memberi (*religious giving*). Para pemudik juga mendapat spirit dari ajaran Nabi

Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tangan di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan di bawah (peminta).

Tetapi, ada yang lebih penting dari mudik ke kampung halaman, yaitu mudik ke kampung rohani. Secara spiritual, mudik dalam Alquran berarti kembali kepada ampunan Allah. Dalam konteks itu, Allah berfirman: “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa (QS. Ali ‘Imran: 133).”

Firman Allah tersebut berbicara mengenai perintah agar kita segera “mudik” dengan cara kembali kepada ampunan Tuhan. Jika dalam tradisi mudik Idul Fitri kita harus mempersiapkan bekal yang begitu banyak, untuk kembali kepada Allah jelas dibutuhkan bekal yang lebih banyak lagi. Derajat ketakwaan sebagai hasil ibadah puasa bisa dijadikan bekal yang sangat berharga untuk kembali kepada Allah.

Sayang, kita diingatkan Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa tidak semua orang yang berpuasa mampu mencapai derajat ketakwaan karena gagal menangkap pesan puasa. Salah satu pesan ibadah puasa adalah kita menjadi hamba yang memiliki sifat kasih sayang. Aktualisasi sifat itu bisa diwujudkan melalui sikap senantiasa berempati kepada fakir miskin. Selama berpuasa, kita juga telah berlatih untuk menahan lapar dan dahaga. Maka, di tengah situasi masyarakat miskin di pedesaan, pesan puasa tersebut rasanya bisa dijadikan spirit untuk membangun solidaritas sosial.

Melalui tradisi mudik, kita juga memperoleh pelajaran betapa pemudik telah mengamalkan pesan puasa dalam wujud yang sangat positif. Mereka datang dari tempat yang jauh karena didorong keinginan untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan dengan keluarga dan tetangga. Mereka juga mengajarkan berbagi kebahagiaan dengan sesama melalui pemberian angpao, pakaian, dan bingkisan Lebaran lain. Di antara pemudik, memang ada yang konsumtif dalam menyambut Idul Fitri. Tentu saja budaya konsumtif itu sangat bertentangan dengan pesan puasa yang mengajarkan kesederhanaan.

Menurut ajaran agama, Idul Fitri tidak harus diwujudkan dalam bentuk berpakaian baru dan kebiasaan konsumtif lain. Perayaan Idul Fitri harus ditandai dengan peningkatan ketaatan kepada Allah. Hal tersebut sejalan dengan ajaran yang menyatakan, *laysa al-'id liman labisa aljadid wa lakinna all-'id liman taqwahu yazid*, yaitu

esensi Idul Fitri itu tidak terletak pada pakaian baru, melainkan ketakwaan yang terus bertambah. Semoga Ramadan menjadi bulan luar biasa yang mampu mengubah kultur hidup kita dari yang belum taat menjadi lebih taat kepada Allah.

Haji, Laksana Pertunjukan Akbar

Tokoh revolusioner Iran, Ali Shariati (1933-1977), dalam karyanya yang berjudul *Hajj (The Pilgrimage)*, mengilustrasikan ibadah haji laksana sebuah pertunjukan. Pernyataan Shariati itu jelas tidak berlebihan jika kita memperhatikan protokoler ibadah haji.

Jika diamati secara seksama, jelas sekali bahwa pelaksanaan rukun Islam kelima itu memang laksana sebuah pertunjukan. Tetapi, bukan pertunjukan biasa, melainkan pertunjukan akbar karena melibatkan jutaan orang. Dalam pertunjukan akbar itu, Allah SWT langsung bertindak sebagai sutradara. Tokoh-tokoh yang harus diperankan diantaranya Adam, Ibrahim, Hajar, dan setan.

Lokasi utamanya di sekitar Masjidharam, Masjid Nabawi, Tanah Haram, Kakbah, Shafa, Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan tempat bersejarah lain yang selalu mengundang jamaah haji untuk berziarah. Simbol-simbol yang penting diperhatikan adalah siang, malam, matahari terbit, matahari tergelincir, matahari terbenam, berkorban, tahallul (mencukur rambut), dan berhalah.

Baju kebesaran yang harus dipakai adalah pakaian ihram. Dan, pemain utamanya adalah setiap jamaah haji itu. Karena ibadah haji itu laksana sebuah pertunjukan, setiap pemain dituntut untuk memainkan peran dengan penuh penghayatan. Untuk itulah, setiap jamaah haji harus membawa bekal yang terbaik saat berangkat ke Tanah Suci. Dalam sudut pandang Alquran dikatakan bahwa sebaik-baiknya bekal yang harus dibawa jamaah haji adalah takwa (QS. Al-Baqarah: 197).

Modal ketakwaan itulah yang akan menjamin setiap jamaah dapat dapat meneladani karakter tokoh-tokoh yang diperankannya. Di samping itu, modal ketakwaan juga diperlukan untuk menata niat agar ibadah hajinya diterima Allah SWT. Apabila dihayati dengan baik, prosesi ibadah haji pasti dapat mengantarkan setiap pribadi dalam kehidupan yang diwarnai kesadaran mengenai keberadaan Allah. Rumah Allah (Baitullah, Kakbah) yang mengarah ke semua penjuru jelas melambangkan bahwa Allah berada di mana saja.

Tatkala kesadaran itu muncul, setiap jamaah haji termotivasi untuk mencium Hajar Aswad atau minimal melambaikan tangan ke arah Kakbah. Saat itulah setiap jamaah haji merasakan kedekatannya dengan Allah. Tanpa disadari air mata pun tumpah sebagai wujud syukur karena dapat memenuhi panggilan Allah untuk berkunjung ke Kakbah. Pertanyaannya, dapatkah jamaah haji menghayati peran yang dimainkannya? Menjawab pertanyaan ini memang tidak mudah.

Tetapi, umumnya jamaah haji sukses memainkan peran dalam pertunjukan akbar itu. Salah satu indikatornya, tidak ada jamaah haji yang "kapok" berangkat ke Tanah Suci. Yang terjadi justru keinginan untuk senantiasa dipanggil sebagai tamu-tamu Allah. Itu setidaknya dapat diamati dari jumlah antrean calon jamaah haji (CJH) yang semakin mengular. Apalagi berdasarkan data Kemenag per-Juli 2013, jumlah antrean CJH telah mencapai 1.726.786 orang.

Padahal terhitung sejak 2013 kuota CJH Indonesia mengalami pemangkasan dari pemerintah Arab Saudi hingga mencapai 20 persen. Kebijakan itu diambil karena ada proyek renovasi Masjidilharam, yang menurut rencana berlangsung hingga 2016. Yang harus dilakukan Kemenag seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi adalah memberikan kepastian kepada CJH. Penentuan siapa yang berangkat dan siapa yang masuk daftar tunggu harus transparan. Hal itu penting untuk menghindari budaya potong

kompas sebagian CJH. Jika praktik potong kompas itu tidak diantisipasi, pasti akan timbul keresahan antar-CJH.

Di beberapa daerah antrean CJH kini mencapai 15 tahun. Artinya, jika ada orang mendaftar haji sekarang, ia harus menunggu 15 tahun lagi. Saat itulah ia baru berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Harus diakui bahwa rangkaian proses ibadah haji telah memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi jamaah. Tidak mengherankan jika selalu muncul kerinduan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Tetapi, harus diingat, kini ada jutaan orang yang sedang antre menjadi tamu Allah.

Karena itulah, orang yang sudah berhaji harus berempati dengan menahan ego spiritualitasnya guna memberikan kesempatan kepada saudaranya. Karena itu, kita harus mendukung ikhtiar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Dirjen PHU Kemenag) yang terus mengampanyekan program beribadah haji cukup sekali dalam seumur hidup. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama harus terlibat dalam kampanye mulia ini.

Penting dikemukakan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga hanya berhaji sekali selama hayat beliau. Fakta sejarah itu penting untuk dijadikan teladan bagi setiap pribadi. Tetapi, harus diakui, tidak mudah untuk memahami umat bahwa ibadah haji itu cukup sekali. Itu sekali lagi disebabkan ibadah haji selalu menghadirkan pengalaman keagamaan yang sangat mendalam.

Apalagi Allah selalu memanggil setiap jamaah haji dengan sebutan yang sangat menyentuh hati nurani setiap jamaah yakni tamu-tamu Allah (*wafduallah*). Dengan panggilan itu, Allah yang akan menjadi tuan rumah. Karena itu, dikatakan bahwa jamaah haji berkunjung ke Baitullah. Sebagai tuan rumah, Allah yang akan menyambut, melayani, dan memberikan rasa aman bagi jamaah haji. Dalam beberapa Hadits, Rasulullah juga menekankan keutamaan ibadah haji. Misalnya, Nabi bersabda bahwa ibadah haji yang diterima Allah (*mabrur*) itu pahalanya tiada lain kecuali surga.

Karena janji yang diberikan Allah dan Rasulullah begitu rupa, motivasi umat untuk menjalankan ibadah haji terus bergelora. Setiap tamu Allah pasti selalu teringat saat melaksanakan prosesi ibadah haji. Selalu terbayang tatkala ia mengelilingi Kakbah (*tawaf*), berjalan mondar-mandir antara Bukit Shafa dan Marwah (*sai*), berkumpul di Arafah (*wukuf*), melontar dengan batu-batu kecil

(*jumrah*), bermalam (*mabit*) di Muzdalifah dan Mina, menggunting atau mencukur rambut (*tahallul*), dan mencium batu hitam (*Hajar Aswad*).

Khusus jamaah haji laki-laki juga ada ketentuan yang harus dipatuhi. Misalnya kewajiban menggunakan pakaian ihram, dua helai kain putih yang tidak berjahit. Pada saat tertentu juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki. Jika pakaian ihram telah dikenakan, tidak boleh lagi bersolek. Bersisir, menggunting kuku, dan mencabut bulu, apabila dilakukan saat berpakaian ihram, akan dikenai denda. Terlebih lagi jika bercumbu, membunuh binatang, dan mencabut tanaman. Semua larangan itu harus di jauhi karena Allah semata.

Hanya dengan menyerahkan diri secara bulat kepada Allah, para jamaah akan memahami peran yang dimainkan dalam keseluruhan prosesi ibadah haji. Rangkaian ibadah haji itu jelas memberikan pengalaman rohani yang tak terlupakan bagi orang yang sudah berhaji. Akibatnya, kerinduan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci pun terus menggelora. Tetapi harus diingat, kini ada jutaan orang yang antre menjadi tamu Allah. Karena itu, bagi yang sudah berhaji harus menahan ego spiritualnya guna memberikan kesempatan kepada saudaranya. Bukankah Nabi telah memberikan teladan bahwa berhaji itu cukup sekali?

Berdakwah Seharusnya Nirkekerasan

Setelah berhasil menembak mati pelaku terorisme di Tulungagung, Jawa Timur, aparat kini dihadapkan pada tugas yang tak kalah berat. Yaitu menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap melakukan tindakan anarkistis. Untuk itulah, kasus bentrokan yang melibatkan massa Front Pembela Islam (FPI) dengan kelompok masyarakat Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah, harus segera dituntaskan aparat agar kejadian serupa tidak terulang.

Pentolan FPI beralasan bahwa razia atau *sweeping* selalu dilakukan dalam konteks dakwah islamiah. Strategi dakwah model FPI itu pun mengundang keprihatinan banyak kalangan. Tak ketinggalan, Presiden SBY saat itu juga menaruh keprihatinan yang mendalam. Saat menghadiri buka puasa bersama ribuan anak yatim di Jakarta International Expo Kemayoran, 21 Juli 2013, beliau menyatakan bahwa Islam tidak identik dengan kekerasan. Islam tidak identik dengan main hakim sendiri. Islam juga tidak identik dengan perusakan. Jika ada elemen melakukan itu dan mengatasnamakan agama, justru memalukan Islam.

Pernyataan SBY itu pun direaksi berlebihan oleh petinggi FPI. Presiden FPI Habieb Riziq bahkan keceplosan dengan menyebut SBY sebagai “pecundang”. Padahal jika dicermati, pernyataan SBY terasa tepat karena berdakwah seharusnya tidak dilakukan dengan kekerasan. Apalagi tindakan anarkistis itu dilakukan saat umat tengah khusyuk beribadah puasa. Bentrokan berawal saat rombongan FPI dari Temanggung, Magelang, dan Yogyakarta berniat untuk melakukan *sweeping* tempat hiburan di Kendal.

Warga yang tidak terima kemudian melakukan perlawanan. Bentrok massal pun tak terhindarkan hingga mengakibatkan jatuh korban jiwa dan kerusakan beberapa mobil milik anggota FPI. Anggota FPI bahkan sempat tersudut hingga menyelamatkan diri di Masjid Besar Sukorejo. Massa FPI baru bisa diselamatkan setelah polisi dan TNI mengerahkan personel untuk mengevakuasi.

Tindakan anarkistis yang melibatkan anggota FPI jelas bukan hanya kali ini. Setiap Ramadan anggota FPI selalu aktif melakukan *sweeping* di tempat yang potensial menjadi ajang berbuat maksiat. Ironisnya, tindakan anarkistis FPI itu dikatakan bagian dari dakwah untuk memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran (*al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu 'an al-munkar*). Pandangan ini jelas sikap yang berlebihan dalam menerjemahkan ajaran dakwah amar makruf nahi munkar.

Pandangan FPI yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mengambil tindakan hukum, apalagi bersifat anarkistis, jelas harus diluruskan. Apalagi tindakan itu dilakukan dengan mengatasnamakan amar makruf nahi munkar. Padahal tugas amar makruf nahi munkar tidak boleh dilakukan sembarang orang. Pembaru (mujadid) muslim ternama, Jalaluddin Al-Suyuthi, berpendapat bahwa tidak semua orang dapat menyuruh pada yang *ma'ruf* (apa saja yang dipandang baik dan diperintahkan syara') dan melarang yang *munkar* (apa saja yang dipandang buruk, diharamkan, dan dibenci syara').

Al-Suyuthi menegaskan bahwa hanya ulama dan penguasa yang berhak untuk menjalankan tugas amar makruf nahi munkar. Ulama berhak menjalankan tugas tersebut karena memiliki ilmu. Sedang penguasa dipandang dapat menunaikan tugas tersebut karena memiliki kekuasaan. Karena itu, penting ditekankan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah membawa bangsa ke arah kemuliaan dan menyelamatkannya dari kerusakan.

Tugas pemerintah ini akan semakin efektif jika disertai dengan integritas aparat penegak hukumnya. Dengan kekuasaan dan integritas yang dimiliki aparat, pemerintah pasti memiliki kewibawaan untuk memerintahkan yang baik serta melarang dan menghukum pelaku kemungkaran. Merujuk pada pendapat Al-Suyuthi tersebut, tugas mengajak pada kebaikan serta melarang dan menghukum pelaku kemungkaran hanya boleh dilakukan ulama dan pemerintah.

Dalam menjalankan tugas amar makruf nahi munkar tersebut bahkan harus tetap dikedepankan prinsip kasih sayang dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Itu berarti bahwa untuk menjalankan prinsip mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran tidak boleh disertai dengan melakukan kemungkaran yang serupa. Tegasnya, dakwah seharusnya dilakukan dengan tanpa kekerasan (nirkekerasan). Bukankah prinsip dalam berdakwah semestinya mengajak dan merangkul?

Apalagi Nabi Muhammad SAW berpesan agar dalam berdakwah kita selalu berpegang pada prinsip untuk mempermudah dan tidak mempersulit, menggembirakan dan tidak menakut-nakuti. Spirit inilah yang perlu dikedepankan kelompok ormas radikal tatkala menerjemahkan ajaran Islam tentang amar makruf nahi munkar. Para pengemban misi dakwah Islam (mubalig/dai) harus menyadari bahwa beragama itu sebuah pergumulan yang tak pernah selesai.

Untuk menjadi pemeluk agama yang baik pasti membutuhkan waktu. Dalam pergumulan menjadi pemeluk agama yang baik itu, seseorang bahkan terkadang harus mengalami jalan berliku. Disadari atau tidak, pengalaman keagamaan yang panjang dan berliku pasti dialami setiap orang. Karena itulah, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya keberagamaan seseorang selalu berproses (*becoming*). Pada konteks itulah setiap orang yang beragama harus menyadari bahwa dirinya sedang berproses menjadi pribadi yang lebih baik.

Karena perilaku keberagamaan itu berproses, yang penting dilakukan adalah memberikan pembinaan secara berkelanjutan agar seseorang mau berubah menjadi lebih baik. Termasuk yang perlu dibina dalam hal ini mereka yang belum terbuka hatinya untuk memanfaatkan Ramadan sebagai bulan beribadah. Mereka yang berpotensi merusak suasana Ramadan seperti pengelola hiburan malam, lokalisasi, rumah makan, dan warung tegal (*warteg*) juga harus menaati peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Jika masih ada yang tidak menaati peraturan, jalan yang terbaik adalah menyerahkan pada aparat yang berwenang. Kita harus meyakini bahwa masih banyak aparat yang bekerja dengan penuh integritas. Dalam konteks penertiban ormas anarkistis itulah, masyarakat berharap pada aparat yang berintegritas. Sekali saja aparat tidak menunjukkan komitmen moral yang baik, itu berarti memberi peluang ormas radikal semacam FPI untuk bertindak sesuai caranya.

Semoga model dakwah anggota FPI yang cenderung anarkistis tidak terulang karena kita selalu merindukan kehidupan keberagaman yang ramah dan toleran.

Mewaspadai Virus ISIS

Seruan berbagai komponen bangsa agar masyarakat tidak terprovokasi ajakan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) harus ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih konkret. Pemerintah bersama kekuatan *civil society* harus mengambil langkah-langkah antisipasi agar kelompok militan tersebut tidak menyebarkan virus radikalisme di Indonesia. Itu karena di negara asalnya, Irak dan Suriah, ISIS dikenal sebagai kelompok yang menempuh cara radikal dalam mewujudkan perjuangannya. Kelompok pimpinan Abu Bakr Al-Baghdadi ini juga selalu mengobarkan semangat jihad demi mewujudkan Negara Islam Terpadu yang melintas dari Irak hingga perbatasan Suriah.

Karena itu, tidak berlebihan jika *New York Times* dalam pemberitaannya menyebut ISIS sebagai kelompok militan yang harus diwaspadai. Sejak menguasai kota-kota penting di Irak dan Mosul di Tikrit, ISIS terus menjadi perbincangan dunia. Dalam edisi berbahasa Arab, ISIS diterjemahkan dengan *Al-Dawlah Al-*

Islamiyah fi Al-'Iraq wa Al-Sham. Kata *Al-Sham* merupakan nama klasik untuk Damaskus, pusat kekuasaan Islam semasa kekhalifahan Daulah Umayyah. Kini *Al-Sham* meliputi wilayah Suriah, Israel, Lebanon, dan bagian tenggara Turki.

Dengan demikian, cakupan wilayah Negara Islam Terpadu yang dicitakan ISIS melintasi batas negara-bangsa. Selain menggunakan strategi jihad yang disertai radikalisme, cita-cita ISIS untuk mewujudkan Negara Islam Terpadu bercorak kekhalifahan jelas bertabrakan dengan semangat nasionalisme yang digelorkan para pendiri bangsa. Ironisnya, beberapa kelompok fundamentalis di Tanah Air dikabarkan telah memberikan dukungan bagi perjuangan ISIS. Ini jelas dapat menjadi virus yang berbahaya bagi NKRI, gagasan nasionalisme, dan dakwah Islam yang moderat.

Embrio gagasan nasionalisme dapat dilacak dari spirit Dokter Wahidin Sudirohusodo dan beberapa pelajar sekolah kedokteran saat mendirikan Budi Utomo di Jakarta pada 20 Mei 1908. Tanggal pendirian Budi Utomo itu ditetapkan sebagai permulaan kebangkitan nasional atau gerakan kebangsaan. Sebagai gerakan kebangsaan yang berideologi nasionalis-Jawa, Budi Utomo telah menunjukkan sifat terbuka. Itu dapat diamati melalui penerimaan anggota Budi Utomo terhadap kelompok dari luar. Penting juga dikemukakan hubungan baik tokoh-tokoh Budi Utomo dengan KH. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.

Dahlan bahkan berkesempatan untuk memberikan pelajaran agama pada anggota Budi Utomo. Saat Budi Utomo menyelenggarakan kongres pada 1917, Dahlan diundang secara khusus untuk memberikan ceramah. Hebatnya, kongres Budi Utomo itu diselenggarakan di rumah Dahlan. Peserta kongres ternyata sangat tertarik dengan ceramah Dahlan sehingga di antara mereka meminta untuk memberikan pengajian sekaligus membuka cabang Muhammadiyah di daerahnya.

Fakta ini penting dikemukakan untuk memberikan penegasan bahwa telah terjadi sinergi antara pelopor gerakan nasionalisme dan tokoh-tokoh Islam. Sinergi itu dimungkinkan karena di antara mereka memiliki kesamaan tujuan yakni mengantar bangsa menjadi lebih maju, berdaulat, dan terbebas dari segala penindasan. Pertemuan tokoh-tokoh nasionalis dan agamais juga menunjukkan bahwa cita-cita gerakan kebangsaan sejalan dengan ajaran agama. Melalui gerakan kebangsaan, tokoh-tokoh nasionalis berjuang dengan

sepenuh hati untuk mencapai kedaulatan bangsa.

Agama juga mengajarkan spirit yang senada dengan cita-cita bangsa seperti ajaran tentang kemerdekaan (*al-hurriyah*), keadilan (*al-'adalah*), musyawarah (*syura*), egalitarianisme (*al-musawa*), dan keberagaman (*al-tanawwu*). Nilai-nilai keagamaan itu sangat relevan dengan keinginan tokoh-tokoh pergerakan yang bercita-cita agar bangsa Indonesia terbebas dari kolonialisme sehingga berdaulat, berkeadilan, dan berkedudukan yang sama dengan bangsa lain.

Melalui kesamaan persepsi itulah, tokoh-tokoh pergerakan, baik yang berlatar belakang nasionalis maupun agamis, bersatu untuk mewujudkan organisasi politik yang dalam konteks modern disebut negara bangsa (*nation state*). Kesadaran untuk mewujudkan suatu bangsa jelas membutuhkan pengorbanan semua komponen. Apalagi jika berkaca pada realitas kemajemukan bangsa yang multietnik, agama, dan budaya.

Dalam konteks inilah kita perlu merenungkan pernyataan teoretikus Prancis, Ernest Renan (1823-1892), ketika mendefinisikan bangsa. Menurut Renan, bangsa adalah suatu perwujudan solidaritas tingkat tinggi yang dibangun oleh kesediaan berkorban pada masa lalu berikut kesiapan untuk menghadapi masa depan. Ungkapan Renan menegaskan bahwa untuk tetap menjadi suatu bangsa, yang dibutuhkan adalah kemampuan merawat solidaritas dan semangat rela berkorban. Untuk merawat nilai-nilai solidaritas dan pengorbanan yang menjadi ikatan suatu bangsa ternyata tidak mudah. Itu karena kini bermunculan gerakan keagamaan yang bercorak transnasional.

Salah satunya ISIS yang saat ini mengundang perhatian dunia. Meski gerakan keagamaan transnasional terkadang bervariasi, umumnya mereka memiliki pandangan politik yang sama. Doktrin politik yang dianut adalah agama dan negara merupakan satu kesatuan. Ajaran Islam dipahami mencakup persoalan agama dan negara sekaligus (*al-din wa al-dawlah*).

Doktrin ini menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal bersifat kompatibel sehingga harus dilaksanakan di segala waktu dan tempat. Bagi gerakan keagamaan fundamentalis, pemisahan agama dan negara adalah sesuatu yang tidak terbayangkan. Kelompok fundamental juga berpandangan bahwa praktik politik yang harus dijadikan rujukan adalah Islam periode awal yakni pada masa Nabi dan sahabat. Cita-cita kelompok Islam politik ini

kemudian diwujudkan melalui perjuangan yang berorientasi pada gerakan transnasional.

Kelompok ini pun berpandangan bahwa sistem khilafah merupakan solusi yang paling tepat untuk menegakkan cita-cita politik umat. Dengan mencitakan dunia yang dipimpin seorang khalifah berarti tidak ada tempat bagi nasionalisme. Sebab, nasionalisme lebih menekankan kesamaan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan nasionalisme juga mengakui eksistensi keragaman etnik, agama, budaya, dan bahasa sebagai entitas yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sementara cita-cita politik gerakan transnasional bersifat lintas batas dan didasarkan kesamaan agama. Kini tugas kita adalah mengajak berbagai elemen, terutama pemuda, agar tidak teracuni virus yang diwacanakan ISIS dan kelompok transnasionalisme lainnya. Apalagi sudah jelas bahwa dalam menempuh setiap perjuangannya, mereka selalu menghalalkan segala cara.

Kampus dan Deradikalisasi

Awalnya banyak pihak menduga bahwa pemberitaan tentang Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) merupakan pengalihan perhatian umat terhadap serangan Israel ke Palestina. Dugaan itu dapat dimaklumi karena berita media cetak dan elektronik tentang pembantaian warga sipil di Gaza, Palestina oleh pasukan Israel telah mengundang perhatian dunia. Namun, dugaan itu berubah seiring dengan semakin terkuaknya ISIS sebagai gerakan politik yang radikal.

ISIS memang lebih tepat disebut gerakan politik, karena konteks kelahirannya merupakan reaksi terhadap situasi sosial politik di Irak dan Suriah. Sebagai gerakan politik yang mengatasnamakan Islam untuk merebut kekuasaan di Irak dan Suriah, ISIS tampak sangat cerdas tatkala mengampanyekan wacana negara Islam, khilafah, dan semangat anti Barat. Dampaknya, kelompok-kelompok fundamental yang sudah sekian lama bercita-cita mendirikan negara Islam menjadi terpesona. Karena itulah, kita harus memosisikan ISIS sebagai gerakan politik, bukan gerakan Islam.

Apalagi dalam mencapai tujuannya, ISIS telah menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara radikal yang dibumbui dengan spirit jihad. Padahal, substansi ajaran jihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan sebagaimana diperintahkan syariat. Bahkan tokoh Muhammadiyah, Buya A. R. Sutan Mansur, memaknai jihad dalam arti bekerja dengan sepenuh hati. Perspektif ini penting dikembangkan karena sama sekali tidak mengaitkan jihad dengan perang.

Dalam banyak kasus radikalisme bernuansa agama di Tanah Air, jelas sekali kaum muda selalu menjadi sasaran kaderisasi. Dari banyak pengakuan tersangka ISIS maupun kasus terorisme lainnya, mereka mengaku sangat aktif merekrut kader-kader muda terutama dari kampus. Kaum muda yang sedang menuntut ilmu di kampus sengaja disasar karena mereka umumnya masih dalam proses menemukan jati dirinya (*becoming*). Di tengah proses "menjadi" itulah, mereka sering kali terpesona dengan ideologi politik yang dikemas dengan simbol-simbol keislaman.

Karena kampus telah menjadi sasaran kelompok radikal, sivitas perguruan tinggi (PT) harus waspada. Pimpinan PT harus menyelamatkan mahasiswanya dengan menanamkan pendidikan tentang nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Langkah ini penting karena ada peningkatan radikalisme di PT, seperti ditunjukkan dalam berbagai kasus tawuran antarmahasiswa, demonstrasi anarkistis, serta keterlibatan sebagian mahasiswa dalam jaringan terorisme, Negara Islam Indonesia (NII), dan ISIS.

Untuk mencegah penyebaran virus radikalisme di kalangan kaum muda, terutama yang ada di kampus, mahasiswa harus diajak untuk mempelajari nilai-nilai kewarganegaraan. Tentu tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan (*civic knowledge*), mahasiswa harus didorong untuk mengaktualisasikan pengetahuan mengenai *civic values* hingga mewujud dalam sikap dan watak (*civic disposition*), serta perilaku keseharian (*civic skill*). Melalui cara itulah, nilai-nilai kewarganegaraan menjelma menjadi budaya dalam kehidupan kaum muda di kampus.

Agar nilai-nilai kewarganegaraan menjadi budaya, dibutuhkan "gerakan" dari seluruh sivitas. Langkah selanjutnya adalah mendorong mahasiswa terlibat aktif dalam program deradikalisasi. Setiap mahasiswa dapat berfungsi sebagai pendidik untuk teman sebayanya (*peer teaching*), terkait dengan persoalan radikalisme. Fakta sejarah

telah menunjukkan bahwa sesungguhnya kaum muda (pelajar dan mahasiswa) selalu berperan dalam berbagai peristiwa yang menentukan perjalanan bangsa.

Itu dapat diamati dari berbagai peristiwa bersejarah yang menunjukkan peranan kaum muda sebagai pendorong perubahan, seperti Kebangkitan Nasional (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi Kemerdekaan (1945), pergerakan mahasiswa (1966), dan reformasi (1998). Kiprah kaum muda tersebut menunjukkan bahwa mereka sejatinya memiliki kultur keilmuan dan keterampilan berorganisasi yang hebat.

Mahasiswa seharusnya meneladani figur-figur penting yang berpengaruh dalam dunia pergerakan, diantaranya Ahmad Wahib, seorang mahasiswa yang terus bergulat dalam pencarian jati dirinya. Melalui pergulatannya itulah lahir karya monumental; *Pergolakan Pemikiran Islam* (1981). Juga ada Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang mewacanakan "Islam Yes, Partai Islam No". Gagasan itu merupakan bagian dari cita-cita besar Cak Nur untuk menyegarkan paham keagamaan umat. Pernyataan Cak Nur itu sekaligus menjadi kritik terhadap perilaku politisi muslim yang terhimpun dalam partai-partai Islam.

Kiprah Ahmad Wahib dan Cak Nur dapat menjadi inspirasi mahasiswa untuk mendialogkan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Untuk itulah, mahasiswa perlu terlibat dalam program deradikalisasi di kampus. Pelibatan mahasiswa dapat dimulai dengan mengajak mereka mewacanakan tema-tema yang berkaitan dengan *civic values*, seperti Pancasila, demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme.

Tema demokrasi menarik dibahas terutama dalam kaitan dengan ajaran Islam dan Pancasila. Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi harus dipahami sebagai perwujudan ajaran Islam tentang musyawarah (*syura*). Karena itu, praktik demokrasi dengan segala kekurangannya harus terus disemai. Sementara pluralisme dan multikulturalisme, juga penting karena berkaitan dengan komitmen bangsa untuk bersatu dalam keragaman (*unity in diversity*). Dalam pernyataan penuh hikmah dikatakan bahwa perbedaan di kalangan umat (yang terdidik) adalah rahmat.

Kita juga sering mendengar slogan yang menyatakan bahwa perbedaan itu indah. Meski realitas bangsa menunjukkan "ber-Bhineka", namun harus tetap "Tunggal Ika". Itu berarti perbedaan

seharusnya tidak menghalangi kita untuk bersatu sehingga kehidupan terasa penuh rahmat dan indah. Dalam konteks program deradikalisasi di kampus itulah, mahasiswa dapat menjadi pelopor dialog lintas etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan.

Dialog tidak harus dipahami secara formal, melainkan juga dialog-dialog informal melalui berbagai media yang bisa “melupakan” status sosial, etnis, budaya, dan agama. Kini tugas mahasiswa adalah memperbanyak perjumpaan informal demi terwujudnya generasi masa depan bangsa yang terbuka, sehingga tidak mudah terpesona dengan ideologi baru yang radikal, militan, dan intoleran.

Start Surabaya Bebas Prostitusi

Pada hari Jum'at, bertepatan pada tanggal 21 Desember 2012, Pemkot Surabaya mulai mengambil langkah riil untuk membebaskan kota metropolis dari praktik prostitusi. Ikhtiar untuk membebaskan Surabaya dari praktik prostitusi dimulai dengan penutupan lokalisasi di kawasan Dupak Bangunsari. Selanjutnya, secara bertahap, Pemkot Surabaya akan menutup lokalisasi di kawasan Sememi, Klakah Rejo, Jarak, Tambak Asri, dan Dolly. Kebijakan ini akan membuat warga metropolis menyaksikan Kota Surabaya yang modern, berbudaya, dan religius. Itu berarti semakin menambah *branding* Surabaya yang sebelumnya dikenal sebagai kota yang bersih dan hijau.

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan, sudah tentu pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Hal itu disebabkan praktik prostitusi di Surabaya telah begitu menyebar, berakar kuat, dan melibatkan jaringan antarkota, antarprovinsi, dan bahkan antarnegara. Selain itu, ada begitu banyak kepentingan, baik individu

maupun kelompok, yang memperoleh keuntungan dari keberadaan lokalisasi. Itu dapat diamati dari kepentingan mucikari, pekerja seks komersial (PSK), pelanggan, panti pijat, pemilik warung, penyedia jasa keamanan, dan tukang parkir. Karena itu, menjadi langkah yang tepat ketika pemerintah kota dan provinsi mengajak berbagai elemen bersinergi untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi.

Praktik prostitusi sejatinya merupakan tragedi kemanusiaan. Perbuatan itu melawan nilai-nilai kemanusiaan. Apalagi, dalam berbagai kasus, di antara PSK terkadang ada yang menjadi korban perdagangan manusia (*human trafficking*). Mereka dengan terpaksa menjadi PSK. Karena telah masuk jaringan PSK, mereka pun tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari dunia hitam itu. Padahal, pada tingkat tertentu, mereka menyadari bahwa jenis pekerjaannya bertentangan dengan ajaran agama dan suara hati nuraninya. Karena itulah, selain pasrah, mereka tetap berjuang untuk keluar seraya menanti uluran tangan agar dapat menjalani kehidupan secara normal.

Berangkat dari problem riil tersebut, pemerintah dan elemen lain harus bersinergi untuk mengentas PSK. Salah satu elemen non pemerintah yang telah mengambil langkah solutif adalah Muhammadiyah. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin telah memimpin serangkaian kegiatan untuk menutup lokalisasi. Amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan di kawasan lokalisasi Dupak Bangunsari juga telah sekian lama digunakan untuk mendidik anak-anak dari keluarga PSK. Demikian juga halnya dengan masjid, musala, panti asuhan, dan klinik kesehatan. Pejuang kemanusiaan sekaligus aktivis Muhammadiyah kawasan Dupak Bangunsari berpatungan untuk membeli wisma yang dijadikan bisnis "esek-esek". Pembelian wisma itu merupakan strategi yang manjur untuk membebaskan Dupak Bangunsari dari prostitusi.

Organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU pasti memiliki komitmen yang sama dalam melihat problem prostitusi. Sebagai organisasi berbasis sosial keagamaan, keduanya jelas memiliki sumber daya yang memadai untuk membantu pemerintah guna mewujudkan Surabaya terbebas dari prostitusi. Selain amal usaha bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan panti asuhan, dua ormas tersebut memiliki sumber daya manusia yang andal. Dengan demikian, fungsi keduanya dapat dioptimalkan untuk melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan yang berkaitan dengan penanganan

prostitusi.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah agama. Itu karena dalam ajaran moral keagamaan telah dikemukakan tuntunan agar setiap pemeluk agama berakhlak mulia. Misalnya, dikatakan bahwa kita harus menghindari seks bebas (perzinaan), menghindari konsumsi minuman atau makanan yang memabukkan (*khamr*, narkoba), dan larangan mencampakkan diri dalam kerusakan (QS. Al-Baqarah: 195, *wa la tulqu bi aydikum ila al-tahluqah*). Beberapa ajaran itu jika ditaati tentu sudah lebih dari cukup untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat mendatangkan kemudaratan seperti prostitusi.

Seorang doktor bidang psikologi dari Sudan, Malik Badri, mengatakan bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang secara total mampu menghilangkan hubungan seks ilegal. Tapi, itu bukan anjuran untuk pasrah. Pemerintah perlu mengajak semua komponen untuk mengawal dengan konsisten dan berkelanjutan program penutupan lokalisasi. Tidak cukup itu, pemerintah juga harus menggelontor dana sebagai bantuan modal bagi PSK untuk mentas dari dunia hitam.

Tetapi, ikhtiar pemerintah tersebut membutuhkan pendampingan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Untuk itu, perlu mengajak berbagai elemen guna bersinergi. Satu lagi yang penting dilakukan pemerintah ialah membuat regulasi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggan PSK. Semoga langkah besar Wali Kota Tri Risma Harini untuk membebaskan Surabaya dari prostitusi diberkahi Allah SWT dan menjadi kabar bungah menjelang Hari Ibu yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember.

Amal Intelektualisme Buya Syafi'i

Purna tugas sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Ma'arif banyak mencurahkan perhatian untuk kerja-kerja kemanusiaan melalui lembaga yang didirikannya, *Maarif Institute for Culture and Humanity*. Pada Mei 2013 lembaga tersebut berusia satu dasawarsa.

Saat aktif di Muhammadiyah, guru bangsa yang akrab disapa Buya Syafi'i itu dikenal sangat dekat dengan kaum muda progresif dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Bahkan, kelahiran JIMM juga bermula dari diskusi-diskusi di kantor Maarif Institute. Dengan dukungan tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Amin Abdullah, Moeslim Abdurrahman, dan tentu saja Buya Syafi'i, JIMM kian diperhitungkan.

Beberapa pentolan JIMM, seperti Raja Juli Antoni, Fajar Ziaul Haq, dan Ahmad Fuad Fanani, kini pun menjadi penggerak utama kegiatan Maarif Institute. Tak heran, dalam banyak kesempatan Buya Syafi'i tampil menjadi pembela nomor wahid terhadap berbagai kesalahpahaman pada JIMM. Bagi Buya Syafi'i, kaum muda yang

berpikiran progresif dapat menjadi sumber harapan bagi pembaruan (*tajdid*) pemikiran Muhammadiyah. Melalui *Maarif Institute*, Buya Syafi'i beberapa kali menyelenggarakan *workshop* pemikiran Islam yang diikuti kaum muda Muhammadiyah.

Ikhtiar Buya Syafi'i untuk menebar virus intelektualisme di kalangan kaum muda mulai menunjukkan hasil. Gairah intelektualisme di kalangan kaum muda Muhammadiyah terus menggeliat. Muncul beberapa intelektual muda yang produktif mengeluarkan pemikiran. Misalnya, Abd. Rohim Ghozali, Abd Mu'thi, Zuly Qodir, Sukidi, Ahmad Najib Burhani, Zakiyuddin Baidhawiy, dan Pradana Boy.

Selain mengulas pemikiran keislaman era kontemporer, mereka tak jarang memberikan kritik konstruktif terhadap gejala konservatisme di Muhammadiyah. Meski menimbulkan perdebatan, kemunculan kaum muda tersebut patut disyukuri. Spirit *tajdid* Muhammadiyah yang dianggap mulai meredup terlahir kembali.

Memang ada yang menganggap wacana kaum muda progresif telah dihindangi virus "sawan kekanak-kanakan", seperti sok liberal, sok radikal, dan kekiri-kirian. Beberapa tema yang diwacanakan, seperti Islam liberal, Islam proletar, Islam kiri, Islam borjuis, dan pendidikan yang membebaskan model Paulo Freire, dikritik habis. Dalam situasi itu, Buya Syafi'i hadir sekaligus memberikan pembelaan.

Buya Syafi'i berpesan agar warga Muhammadiyah tidak cepat marah dan menuduh mereka sesat. Menurut Buya Syafi'i, selama mereka masih menjalankan prinsip ajaran agama, misalnya shalat dan puasa, mereka tidak perlu dimusuhi. Beliau ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah intelektual dan tenda besar persemaian berbagai mazhab pemikiran (*school of thoughts*).

Buya Syafi'i patut bersyukur karena Din Syamsuddin sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah apresiatif terhadap kiprah kaum muda. Din mengakui bahwa sering ada pertanyaan mengenai eksistensi komunitas yang berpandangan liberal di Muhammadiyah. Pertanyaan itu pun dijawab dengan menyatakan bahwa mereka sesungguhnya tidak "seseram" tuduhan banyak orang. Sebab, kenyataannya, mereka masih mendirikan shalat, berpuasa, dan bahkan dengan sangat lancar mengutip ayat Alquran, hadis, dan kitab-kitab klasik tatkala menyampaikan pandangannya. Karena

itu, menurut Din, kalau mereka masih shalat, puasa, dan meyakini kebenaran Alquran dan hadis, itu jelas bukan liberal.

Pembelaan Buya Syafi'i terhadap kaum muda yang berpandangan progresif jelas menunjukkan keinginan kuat untuk mendorong agar intelektualisme terus tumbuh dan berkembang. Intelektualisme itu penting untuk mengimbangi kecenderungan praksisme di lingkungan Muhammadiyah yang bisa berimplikasi pada kurangnya wawasan. Padahal, wawasan mutlak diperlukan untuk memberikan kesadaran menyeluruh pada kegiatan amaliah. Wawasan juga diperlukan sebagai sumber energi bagi pengembangan yang dinamis dan kreatif dari keseluruhan kegiatan amaliah.

Pada konteks itulah, penting ditekankan usaha untuk menyeimbangkan watak praksisme dan intelektualisme Muhammadiyah yang kini memasuki abad kedua. Dengan usia yang matang, Muhammadiyah tidak boleh terlihat renta sehingga menjadikan lamban dalam memberikan respons terhadap berbagai persoalan.

Akhirnya, diucapkan selamat berulang tahun ke-10 bagi *Maarif Institute*. Juga diucapkan selamat ulang tahun ke-74 kepada tokoh kelahiran 31 Mei 1939 asal Sumpur Kudus, Sawah Lunto, Sumatera Barat, itu. Semoga virus mulia intelektualisme yang telah ditularkan kepada kaum muda menjadi amal saleh Buya Syafi'i .

Bukankah Nabi SAW pernah bersabda bahwa *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya adalah amalan yang pahalanya akan terus mengalir? Dan, saya *hakulyakin* bahwa spirit intelektualisme yang telah diwariskan Buya Syafi'i masuk kategori amal saleh.

Menumbuhkan Kesadaran Multikulturalisme

Pada Mei 2013, keberadaan *Maarif Institute for Culture and Humanity* tanpa terasa sudah memasuki usia 10 tahun. Lembaga yang didirikan Ahmad Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah ini pun tetap konsisten menampilkan diri sebagai gerakan kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Tiga pilar ini tampak begitu berpengaruh dalam keseluruhan pemikiran dan tindakan guru bangsa yang akrab disapa Buya Syafi'i tersebut.

Salah satu keprihatinan Buya Syafi'i dalam kaitan dengan kehidupan keagamaan Indonesia era kontemporer adalah maraknya radikalisme bernuansa agama. Tidak jarang dalam radikalisme itu bahkan terjadi kasus bom bunuh diri. Fenomena itu pun mengundang kritik Buya Syafi'i. Dalam sebuah kesempatan Buya Syafi'i mengatakan bahwa pelaku bom bunuh diri sejatinya individu yang berani menghadapi kematian, tetapi takut dengan kehidupan.

Pada konteks radikalisme yang kian marak itulah Buya Syafi'i mengingatkan pentingnya kesadaran terhadap nilai-nilai

multikulturalisme. Kiprah Maarif Institute sejauh ini juga menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap multikulturalisme. Kesadaran terhadap multikulturalisme ini diperlukan karena terjadi banyak kasus radikalisme berlatar belakang perbedaan etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan. Umumnya radikalisme itu disebabkan ketidaksiapan individu atau kelompok untuk hidup dalam lingkungan yang plural.

Padahal pluralitas menurut Buya Syafi'i merupakan suatu keniscayaan. Dalam perspektif agama, pluralitas disebut bahkan bagian dari ketetapan Tuhan (*sunnatullah*). Multikulturalisme dapat dipahami sebagai paham yang mengajarkan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas budaya sehingga menumbuhkan kepedulian agar kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat. Multikulturalisme juga meniscayakan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok minoritas sehingga kekhasan identitas mereka tetap diakui (Will Kymlicka dalam *Multicultural Citizenship*, 1995).

Dengan demikian, arah multikulturalisme adalah menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik sehingga memungkinkan beragam komunitas berkembang sesuai kekhasan masing-masing. Menurut Haryatmoko (2007), ada tiga alasan yang menjadikan kesadaran multikulturalisme diperlukan. Pertama, ada fenomena penindasan atau penafian atas dasar etnis, budaya, agama, dan paham keagamaan. Dikotomi antara kita (*minna*) dan mereka (*minhum*) seringkali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan.

Pelembagaan diskriminasi ini dapat kita amati di wilayah publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan politik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, kelompok minoritas terus ditekan sehingga kehilangan eksistensinya. Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memarginalkan kelompok tertentu dengan memberi label "tidak terlalu penting" dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri semakin terpatri dalam struktur kesadaran kelompok minoritas.

Pada konteks inilah multikulturalisme penting untuk menjawab kebutuhan mendasar dari kelompok minoritas. Mereka harus diberikan ruang untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya. Ketiga, kaum urban dan migran seringkali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh

kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak undang-undang otonomi daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah seringkali disalahartikan dengan pemihakan terhadap kepentingan warga asli (lokal) sehingga terjadi diskriminasi terhadap warga pendatang.

Rekrutmen pejabat publik pun tidak lagi didasarkan pada kompetensi, tapi asal daerah, golongan, dan afiliasi politik. Faktor dinamika politik lokal jelas sekali turut memengaruhi perspektif kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Sebagai contoh, dalam kasus pemilihan kepala daerah dan penentuan pejabat publik di daerah selalu muncul alasan bahwa yang harus menduduki jabatan adalah representasi kelompok mayoritas. Perspektif ini jelas sangat berbahaya karena akan mengakibatkan penentuan jabatan-jabatan publik tidak lagi mempertimbangkan kapasitas dan *track record*.

Padahal sebagai bagian dari ruang publik, jabatan tersebut harus terbuka untuk setiap orang asal memiliki kompetensi dan integritas. Sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme, rasanya kita layak belajar pada pandangan filsuf Prancis, Emmanuel Levinas (1971). Dalam teori tentang penampakan wajah (*the face of the other*), Levinas mengatakan bahwa penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu berbeda dari aku. Kendati demikian, hubungan aku dan yang lain tidak akan melahirkan kekerasan.

Kehadiran yang lain bahkan akan membuahkan kedamaian dan menumbuhkan kultur positif dalam kehidupan. Melalui teori penampakan wajah akan tergambar wajah yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling menyapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Setiap orang akan dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang tampak akan mencair dalam afeksi sehingga tidak hanya berhenti pada persepsi, tapi juga mengkristal dalam kesadaran seseorang.

Teori Levinas jelas mengajarkan bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditandai kepedulian dan nirkepentingan. Hubungan itu menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain tanpa menuntut balasan. Itu berarti tidak ada tuntutan timbal balik dan tiada pula

dominasi. Jika pandangan Lavinias itu mampu diterjemahkan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, akan terasa sangat indah. Individu atau kelompok tidak akan mudah menghakimi, apalagi menyakiti, karena senantiasa tergambar dalam dirinya wajah orang lain.

Menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Bila kesadaran multikulturalisme dapat ditanamkan, kita selalu melihat pluralitas secara positif, toleran, dan optimistik. Sikap ini penting untuk melahirkan komitmen yang tulus sehingga kita terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya, etnis, agama, dan paham keagamaan. Jadi, jangan dihabiskan energi kita untuk memperdebatkan persoalan yang memang sudah jelas berbeda.

Spirit multikulturalisme itulah yang senantiasa dikembangkan Buya Syafi'i dan Maarif Institute. Pertanyaannya, maukah kita menjadi bagian dari gerakan kebudayaan untuk menumbuhkan kesadaran multikulturalisme?

Oase Gerakan Filantropi

Orang terkaya ke-12 di Indonesia versi Majalah *Forbes*, Dato' Sri Prof Dr Tahir, menjadi buah bibir. Saat hadir di Universitas Kristen Petra Surabaya (14/5/2014), Chairman dan CEO Mayapada Group itu memberikan beasiswa pada mahasiswa sebesar Rp 2 miliar. Saat memberikan sambutan Tahir menyatakan bahwa uang yang disimpan di bank *is not the real wealth*. Menurutnya, justru uang yang disumbangkan untuk membantu orang itulah *the real wealth*. Pernyataan itu semakin menunjukkan posisi Tahir sebagai salah satu filantropis tanah air. Sebelumnya Tahir juga mendermakan hartanya sebesar 100 juta USD (Rp. 1,1 Trilyun) untuk kepentingan kemanusiaan.

Pada awal April 2014, Indonesia juga dikunjungi orang terkaya dunia dan pendiri *software* Microsoft, Bill Gates. Saat itu, Bill Gates memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya mempraktekkan ajaran "welas asih". Bersama sejumlah pengusaha nasional, Gates menaruh perhatian pada problem kesehatan. Ia menyadari betul bahwa pemerintah tidak mungkin mampu sendirian

menyiapkan layanan kesehatan berkualitas. Pemerintah pasti membutuhkan keterlibatan pihak swasta. Untuk itulah Gates menyumbang Rp 450 miliar. Donasi ini untuk mengatasi masalah kesehatan yang menjadi atensi pemerintah, yakni malaria, TBC, HIV/AIDS, keluarga berencana, dan polio.

Yang menarik, saat diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, Gates menceritakan pengalaman pribadinya sebagai filantropis dunia. Dengan senang hati ia mendonasikan sebagian hartanya untuk kepentingan kemanusiaan. Ia yakin tidak akan jatuh miskin hanya karena rajin menyumbang. Pengalaman hidupnya justru mengajarkan bahwa bisnis Microsoft-nya semakin berkembang. Karena itu, ia berpesan pada pengusaha tanah air agar tidak segan menyumbang. Sebab, dengan rajin menyumbang kekayaan akan semakin berlipat.

Teladan dua filantropis dunia itu penting direnungkan. Sepertinya kita harus membuka kembali ajaran agama mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Orang-orang kaya ini telah mengajarkan pada kita pentingnya mempraktekkan ajaran berderma atau *welas asih* pada sesama. Tidak hanya dengan ucapan, dua filantropis tersebut memberikan contoh melalui tindakan. Keduanya juga tidak perlu melihat latar belakang etnis, agama, dan budaya, orang-orang yang disumbang. Yang penting, donasi itu digunakan untuk kepentingan kemanusiaan.

Dalam perspektif sosiologi agama, tindakan para filantropis itu merupakan manifestasi corak keberagamaan yang menonjolkan amal (*a faith with action*). Inilah wujud pengamalan nilai-nilai keagamaan yang dilakukan dengan amal nyata (*bi al-hal*). Di tengah situasi bangsa yang sedang dirundung banyak masalah kemanusiaan seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, kebodohan, dan keterbelakangan, terasa sekali bahwa kita membutuhkan lebih banyak lagi tokoh filantropis.

Ajaran agama sejatinya telah memberikan landasan teologis mengenai nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya dikatakan bahwa keimanan itu hanya absah jika diwujudkan dalam bentuk amal. Itulah sebabnya perintah beriman selalu diikuti dengan seruan untuk beramal (*amanu wa 'amilu al-shalihah*). Dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda bahwa tidak sempurna iman diantara kalian sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri (HR. Bukhari dan Muslim). Sabda Nabi ini menegaskan bahwa

mencintai sesama merupakan tanda kesempurnaan iman.

Ajaran agama juga memerintahkan pemeluknya agar senang memberi (*religious giving*). Karena itu selalu dikatakan bahwa tangan di atas (pemberi) lebih baik dari tangan di bawah (peminta-minta). Dengan bahasa yang menyentuh nurani, Allah SWT juga mengatakan bahwa orang yang gemar berderma itu diumpamakan seperti menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir akan tumbuh seratus biji. Allah juga berjanji untuk melipatgandakan kekayaan orang-orang yang dikehendaki (QS. Al-Baqarah ayat 261).

Karena itu tepat sekali keyakinan yang menyatakan bahwa dengan banyak memberi maka harta akan semakin bertambah. Jika dipahami secara mendalam semua ajaran agama juga bertujuan untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, ibadah haji selalu diakhiri dengan perintah berkorban. Ibadah puasa diakhiri dengan perintah membayar zakat fitrah. Demikian juga ibadah salat yang diakhiri dengan mengucapkan salam. Itu semua menunjukkan bahwa tujuan akhir ibadah adalah mewajibkan pelakunya untuk beramal sosial.

Karena itu, jika ada orang yang rajin melakukan ibadah ritual sementara amal sosialnya buruk maka orang tersebut berarti kurang memahami substansi ajaran agama. Ini penting karena ada kalanya orang rajin salat tetapi juga rajin berbuat maksiat. Begitu juga ada orang yang rajin ibadah haji dan umroh, tetapi sepulang dari tanah suci kembali berbuat korup. Orang seperti ini pasti tidak memahami makna dari amaliah yang dilakukan.

Dalam perspektif psikologi, orang yang melaksanakan amalan baik dan buruk secara bersamaan berarti mengalami kepribadian terbelah (*split of personality*). Orang seperti ini sejatinya sedang sakit mental (*mental illness*). Agama apa pun pasti tidak mengajarkan pemeluknya berkepribadian ganda. Allah SWT menamakan orang yang berkepribadian ganda sebagai pendusta agama (QS. Al-Ma'un: 1-7).

Termasuk dalam kategori pendusta agama adalah mereka yang salat tetapi lalai. Mereka yang lalai itu adalah yang tidak tulus (*riya'*), tidak mau berderma, dan menimbun harta kekayaan. Peringatan ini layak direnungkan agar kita tidak termasuk kelompok yang mendustakan agama. Para pendusta agama itu adalah mereka yang tidak mampu menyelaraskan ibadah ritual dan amal sosial.

Seorang filsuf Barat, Rene Descartes, pernah mengajarkan prinsip *cogito ergo sum* (aku berpikir maka aku ada). Pernyataan itulah yang kemudian menjadi basis ajaran filsafat eksistensialisme. Jika ajaran ini digunakan sebagai inspirasi, maka pernyataan Descartes dapat diubah menjadi *labora ergo sum* (aku beramal maka aku ada). Dengan demikian eksistensi seseorang, apa pun agamanya, sangat bergantung pada kualitas amalnya.

Itu berarti, selain beriman, yang dipentingkan dari keberagaman seseorang adalah amal sosialnya. Spirit beramal yang bermanfaat bagi orang lain itulah yang menjadi substansi ajaran agama. Semoga semangat berderma tokoh-tokoh filantropis dunia menumbuhkan gerakan filantropis untuk kepentingan kemanusiaan.